

ABSTRAK

Penelitian “Pelaksanaan Penelaahan Keberatan Terkait Pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak, Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Semarang”, memiliki tujuan: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan penelaahan terhadap keberatan terkait pengajuan penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi di Direktorat Jenderal Pajak wilayah Jateng I Semarang. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya penyelesaian penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi terkait pengajuan pengurangan atau penghapusan yang dilakukan oleh Pelaksana Penelaah Keberatan di Direktorat Jenderal Pajak wilayah Jateng I Semarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian dengan metode yuridis empiris adalah penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh dari penelitian di lapangan, sedangkan sumber data sekunder yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan penelaah keberatan terkait wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang dilakukan oleh penelaah keberatan (PK) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Semarang, dalam penyelesaiannya diselesaikan melalui non litigasi atau diluar dari pengadilan pajak, dilakukan dengan proses mediasi atau disebut dengan Pembahasan yang diharapkan mampu menyelesaikan dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan cara meneliti dan memahami dokumen-dokumen serta alasan yang diajukan oleh wajib pajak, dimana hasil keputusannya disesuaikan dengan ukuran khilaf wajib pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2015. 2) Faktor-faktor pelaksanaan penelaah keberatan terkait pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dari wajib pajak, diantaranya adalah: a) Adanya unsur khilaf yang terdapat dalam pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUTAP, b) Bukan kesalahan dari wajib pajak, dan c) Wajib Pajak baru terdaftar menjadi Wajib Pajak.

Kata Kunci: Pelaksanaan Penelaahan Keberatan, Wajib Pajak, Penghapusan dan/atau Sanksi Administrasi.

ABSTRACT

Research "The Implementation of Continuous Review Regarding Submission of Deduction or Elimination of Taxpayer Administrative Sanctions, Study in the Regional Office of the Directorate General of Taxes in Central Java I Semarang", has the following objectives: 1) for The Implementation of Continuous Review Regarding Submission of Deduction or Elimination of Taxpayer Administrative Sanctions, Study in the Regional Office of the Directorate General of Taxes in Central Java I Semarang. 2) To find out the factors that can cause reimbursement that is issued or related to administration carried out by the Observer Executor in the Directorate General of Taxes in the Central Java region I Semarang.

The method used in this study is an empirical juridical method. Research with an empirical juridical method is research on the effect of the enactment of law on society. This study uses primary data sources and secondary data sources. Primary data sources are sources obtained from research in the field, while secondary data sources are those consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary materials. Then the data is analyzed qualitatively.

The results of the study show that: 1) the review of the requested taxpayer submitted for approval submitted for approval made by the approval examiner (PK) in the Central Office of the Directorate General of Taxes in Central Java I Semarang, in his investigation requested through non-litigation or from the tax court , carried out by a mediation process or called a discussion that is expected to be resolved and acceptable to all parties. By way of discussing and discussing the documents and the reasons proposed by the taxpayer, where the decision results are in accordance with the size of the taxpayer's mistakes according to the Regulation of the Minister of Finance Number 8 / PMK.03 / 2015. 2) Factors in the implementation of the review related to submission the request or release of responsibility from the taxpayer is approved: a) There is an error element contained in article 36 paragraph (1) letter a KUTAP Law, b) Not a mistake of the taxpayer, and c) New Taxpayers are registered as Taxpayers.

Keywords : Implementation of Objection Review, Taxpayers, Elimination and / or Administrative Sanctions.